

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada intinya adalah proses rekayasa atau rancang bangun kepribadian. Manusia sebagai subjek pendidikan memiliki potensi berubah dan mengubah. Berbagai faktor yang mempengaruhi manusia, baik faktor alamiah maupun faktor ilmiah. Proses berlangsungnya pengaruh itulah yang disebut dengan pendidikan.

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi ini mengisyaratkan bahwa hanya bangsa yang cerdas yang mampu dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus diwujudkan.

Pendidikan menjadi faktor yang sangat dominan dalam menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa. Indonesia yang berbasis pada amanat pembukaan UUD 1945 telah berusaha meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Tetapi usaha tersebut masih banyak mengalami kendala terutama dalam upaya peningkatan mutu di sekolah dan tenaga pendidik.¹

¹ Ali Imron, *Pembinaan Guru di Indonesia*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2000), 2.

Senada dengan Ali Imron, Djohar menilai selama ini dalam proses pembelajaran masih menjadikan guru sebagai subyek dan siswa sebagai obyek. Siswa dipandang sebagai individu pasif yang hanya menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan guru.²

Proses pendidikan yang mengedepankan siswa sebagai pusat dari kegiatan perlu ditingkatkan. Mengingat salah satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia adalah kurangnya kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Proses pembelajaran yang seharusnya menjadi media untuk mengasah pola pikir dan mengubah tingkah laku berubah menjadi tujuan, sehingga siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Proses pembelajaran di kelas seringkali diarahkan kepada mengingat dan menghimpun informasi tanpa dibarengi dengan kemampuan memahami informasi yang diingat untuk dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.³

Kenyataan ini berlaku hampir pada semua mata pelajaran. Pembelajaran agama hanya menyentuh ranah kognitif sehingga tidak dapat mengembangkan sikap yang sesuai dengan norma-norma agama.

Watik dalam Sahlan menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas menyangkut tiga dimensi, yaitu: dimensi ekonomi, dimensi budaya

² Djohar, *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan* (Yogyakarta; Grafika Indah, 2006), 166.

³ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta, Kencana, 2006), 3.

dan dimensi spiritual.⁴ Dimensi spiritual dapat dipenuhi dengan memberikan berbagai pengalaman keagamaan.

Pentingnya ilmu dan agama juga terlihat jelas dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah "...untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Kriteria pertama dan utama dalam rumusan tujuan tersebut adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia. Rumusan ini menunjukkan sistem pendidikan kita justru meletakkan agama lebih dahulu dari pada ilmu pengetahuan.

Penempatan ilmu sesudah agama sesungguhnya logis dan relevan dengan karakter bangsa yang berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketika ilmu yang lebih diutamakan akan dikhawatirkan lahirnya orang-orang pintar tetapi tidak beriman. Akibatnya, kepintaran mereka bisa menghasilkan keburukan yang lebih besar dari pada manfaat. Oleh karena itu, Pendidikan agama memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan rumusan tujuan pendidikan di atas.

Namun dalam kenyataannya, pendidikan kita masih sulit untuk mewujudkan tujuan tersebut. Munculnya berbagai kasus tindakan amoral yang tidak mencerminkan kepribadian yang beriman dan bertakwa serta berakhlak

⁴ Sahlan, *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi)*(Malang: UIN Maliki Press, 2010), 4.

mulia masih kerap ditemukan di negeri ini. Bahkan perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan awam yang berpendidikan rendah, akan tetapi kalangan elit dan berpendidikan tinggi pun tidak luput darinya. Lain lagi dengan kasus tindak kriminal seperti pembunuhan serta perdagangan perempuan dan bayi juga menjadi catatan serius yang belum tertuntaskan. Lebih ironis lagi, banyak pula ditemukan perilaku amoral yang justru dilakukan oleh generasi muda yang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, seperti kekerasan, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba.

Munculnya fenomena di atas acap kali melahirkan kesan negatif terhadap pendidikan agama. Pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam, dinilai gagal mewujudkan kepribadian siswa yang religius dengan karakter iman, ilmu, dan amal secara integral. Terutama di sekolah, PAI dianggap kurang berperan mewujudkan tujuan pendidikan yang religius.⁵

Selain itu Muhaimin menyatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar untuk menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.⁶

Muhaimin menegaskan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam ditujukan untuk menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian dan pemupukan

⁵ Isyemetriah, <http://isyemetriah.blogspot.com/> (19 Desember 2012)

⁶ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2002), 75.

pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengamalan siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.⁷

Secara umum, Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Agama Islam tidak hanya berhenti pada tataran *transfer of knowledge* tetapi juga pada tataran *transfer of value*. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Darajat bahwa pendidikan agama yang amat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan.⁸

Belum berhasilnya pendidikan agama di sekolah dan di masyarakat secara utuh juga ditengarai karena adanya kesenjangan antara pemahaman agama masyarakat dengan perilaku religius yang diharapkan.⁹ Saratri Wilonoyudho menyebut kehebatan menjalankan syari'at agama yang tidak paralel dengan sikap yang muncul dengan istilah involusi religiusitas.¹⁰ Indikator yang tampak

⁷ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 189.

⁸ Zakiyah Darajat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 87. Lihat juga *Filsafat Pendidikan Islam: Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Islam dari Klasik Sampai Kontemporer*, Editor A. Shiddiq (Surabaya: Pena Pesantren, 2012), 43.

⁹ Sahlan, *Mewujudkan Budaya...*, 5-6.

¹⁰ Saratri Wilonoyudho, "Ideologi Agama dan Involusi Religiusitas", dalam <http://Www.Caknun.Com/2013/Ideologi-Agama-Dan-Involusi-Religiusitas> (4 Maret 2013). Saratri menyatakan bahwa istilah ini barangkali tidak tepat, namun hanya sekedar menggambarkan dengan "idiom" saja agar mudah dipahami. Istilah involusi sebenarnya digunakan oleh Geertz dalam bidang pertanian, yang intinya adalah sebuah proses perubahan masyarakat yang mengalami kegagalan, terutama dalam membentuk pola-pola baru. Akibatnya masyarakat gagal menstabilkan

misalnya kasus korupsi, dugaan suap daging impor yang dilakukan salah seorang oknum, tawuran pelajar, pergaulan bebas, kecanduan obat-obatan terlarang dan sebagainya.

Perhatian terhadap pentingnya pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam bagi siswa juga dimaksudkan untuk membentengi siswa dari berbagai kemungkinan adanya pengaruh negatif globalisasi.

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam baik di sekolah umum, madrasah atau sekolah non muslim, dihadapkan dengan beragam problematika. Sejumlah penelitian terkait tentang problematika Pendidikan Agama Islam di sekolah selama ini menemukan beragam problem yang salah satunya adalah karena pelaksanaan pendidikan agama cenderung mengarah pada sisi-sisi pengajaran atau didaktik-metodiknya.¹¹

Abuddin Nata mengungkapkan bahwa upaya membekali siswa untuk siap menghadapi kemungkinan adanya pengaruh negatif globalisasi bukan hanya dengan uang, ilmu pengetahuan dan teknologi saja tetapi juga harus dibarengi dengan pembinaan di bidang mental spiritual dan akhlak yang mulia.¹²

Manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa tentunya tidak dapat terwujud secara tiba-tiba. Manusia beriman dan bertaqwa terbentuk melalui proses kehidupan dan proses pendidikan, khususnya kehidupan

diri menjadi bentuk yang definitif bahkan justru yang terjadi adalah perumitan bentuk. Meski tidak tepat benar jika ini diterapkan dalam kehidupan beragama, namun jika melihat ciri-ciri kehidupan umat beragama saat ini, boleh jadi teori Geertz tersebut dapat digunakan.

¹¹ Sahlan, *Mewujudkan Budaya...*, 26.

¹² Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), xv.

beragama dan pendidikan agama. Proses pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia baik dilingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di masyarakat.

Struktur kurikulum di sekolah mengacu pada PP no. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum jenis pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar diorganisasikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok A dan B. Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok A terdiri atas mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran.

Struktur kurikulum dalam bentuk susunan mata pelajaran ini harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran.¹³ Hal ini berarti bahwa semua siswa di setiap satuan pendidikan berhak mendapat pelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan. Landasan diatas menegaskan bahwa pembelajaran PAI wajib dilaksanakan di setiap sekolah, termasuk di sekolah dasar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah dengan memperbaiki proses belajar mengajar.¹⁴ Hal ini tidak berlebihan, karena rendahnya prestasi belajar tidak terlepas dari berbagai faktor yang salah satunya adalah proses pembelajaran yang diterapkan. Sebagai contoh dominasi guru yang sangat besar dalam proses pembelajaran (*teacher centered*). Dengan proses pembelajaran yang berpusat pada guru, maka minimal guru memiliki tiga peran: guru sebagai perencana, sebagai penyampai informasi dan sebagai evaluator.¹⁵

Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, budi mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

¹³ Muhaimin dkk, *KTSP pada Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 50.

¹⁴ Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), v.

¹⁵ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2012), 97.

Menurut Wina Sanjaya, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dari konsep pendidikan berdasarkan undang-undang tersebut. Pertama, pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti pendidikan di sekolah merupakan proses yang bertujuan. Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ketiga, suasana belajar itu diarahkan agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan kata lain, proses pendidikan harus berorientasi pada siswa. Siswa harus dipandang sebagai makhluk yang terus berkembang. Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tersebut diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman.

Salah satu unsur sumber daya pendidikan yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi siswa adalah kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan siswa menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu

¹⁶ Ibid., 2-3.

berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.¹⁷

Dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal, maka pengembangan kurikulum perlu dilakukan. Pengembangan kurikulum 2013 oleh pemerintah merupakan langkah lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.¹⁸

Berangkat dari fakta di atas, peneliti tergerak untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pemenuhan standar proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Dengan harapan nantinya Pendidikan Agama Islam mampu mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas unggul, lahiriah, dan batiniah serta memiliki keterampilan yang dilandasi dengan kekuatan iman dan taqwa sehingga mampu *survive* dalam arus perubahan sosial budaya pada masa hidupnya.

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar. Penelitian akan mengkaji pelaksanaan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti berdasarkan standar proses (Permendikbud. Nomor 65 Tahun 2013).

¹⁷ Panitia Sertifikasi Guru, *Konsep Dasar Kurikulum SD 2013, Modul PLPG*, (Surabaya: UNESA, 2013), 3.

¹⁸ Panitia Sertifikasi Guru, *Konsep Dasar Kurikulum SD 2013, Modul PLPG*, (Surabaya: UNESA, 2013), 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti:

1. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SDN Kebondalem Mojosari Mojokerto dalam upaya penerapan kurikulum 2013 tahap awal?
2. Bagaimana upaya pemenuhan standar proses pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SDN Kebondalem Mojosari Mojokerto?

C. Tujuan

Penelitian tesis ini ditujukan untuk:

1. Mendeskripsikan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar dengan adanya implementasi Kurikulum 2013 tahap awal.
2. Menganalisis proses pembelajaran PAI dan Budi Pekerti berdasarkan standar proses pendidikan (Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013).

D. Manfaat/Kegunaan

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian tesis ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah cakrawala berpikir dan khazanah pengetahuan tentang kajian Pendidikan Agama Islam.

- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pengelola sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam upaya pemenuhan standar proses pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti bagi siswa muslim. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan terkait pewujudan Pendidikan Agama Islam bagi siswa muslim.
- b. Bagi praktisi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan model pembelajaran serta upaya internalisasi nilai-nilai agama, terutama bagi guru pengajar PAI dan Budi Pekerti.
- c. Memberikan informasi kepada warga sekolah dan masyarakat tentang cara yang dapat dilakukan dalam upaya internalisasi nilai-nilai agama Islam pada generasi muslim khususnya.

E. Studi Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkapkan urgensi pendidikan agama dalam kehidupan yang bersinggungan dengan berbagai aspek. Sekian banyak kegiatan ilmiah tersebut masih memberi ruang untuk menemukan sesuatu yang berbeda di tengah perkembangan laju kehidupan. Berikut ini studi-studi yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti angkat.

Pertama, Izzuddin, Tesis, 2009, Penguatan Nilai-Nilai Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Mewujudkan Budaya Religius di SMAN 1 Gunungsari Lombok Barat. Fokus penelitian tersebut pada upaya penguatan nilai-nilai akhlak dalam mewujudkan budaya religius di lingkungan sekolah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut mengkaji tentang pendekatan dan internalisasi nilai-nilai akhlak sehingga menjadi budaya religius.¹⁹

Kedua, Ramli, Tesis, 2010, Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam. Studi yang dilakukan di MA Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan ini mengkaji tentang strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan, proses perumusan strategi hingga cara mengaplikasikannya.²⁰

Ketiga, Ninin Faria Ulfah, Tesis, 2011, Upaya Kepala Sekolah dalam Pemenuhan Standar Proses (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007) pada pembelajaran PAI. Penelitian ini memandang kepala sekolah memiliki peran yang signifikan dalam proses pembelajaran sehingga memfokuskan penelitian pada upaya kepala sekolah dalam pemenuhan standar proses pembelajaran.²¹

Keempat, Daris Marijan Sayyaf, Skripsi, 2009, Implementasi Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses pada Guru PAI di SMP

¹⁹ Izzuddin, "Penguatan Nilai-Nilai Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Mewujudkan Budaya Religius di SMAN 1 Gunungsari Lombok Barat" (Tesis- -IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

²⁰ Ramli, "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam. Studi yang dilakukan di MA Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan" (Tesis- -IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

²¹ Ninin Faria Ulfah, "Upaya Kepala Sekolah dalam Pemenuhan Standar Proses (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007) pada pembelajaran PAI" (Tesis- -IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

Khadijah 2 Surabaya. Penelitian ini mengulas tentang implementasi standar proses yang berbasis pada kurikulum 2006, KTSP.²²

Kelima, Nur Aini Hasanah, Skripsi, 2010, Implementasi Standar Proses Pembelajaran (Studi Analisis Permendiknas No. 41 Tahun 2007) pada bidang studi PAI di SMP Wali Songo Sembayat Manyar Gresik.²³

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, peneliti dapat memposisikan fokus penelitian yang berbeda. Peneliti memfokuskan pada kajian mengenai upaya pemenuhan standar proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang dilaksanakan setelah pemerintah menggulirkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam mengkaji ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yang berjudul upaya pemenuhan standar proses pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah dasar, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Terkait dengan jenis penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Arikunto penelitian kualitatif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam

²² Daris Marijan Sayyaf, "Implementasi Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses pada Guru PAI di SMP Khadijah 2 Surabaya" (Skripsi - - IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

²³ Nur Aini Hasanah, "Implementasi Standar Proses Pembelajaran (Studi Analisis Permendiknas No. 41 Tahun 2007) pada bidang studi PAI di SMP Wali Songo Sembayat Manyar Gresik" (Skripsi - - IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

langkah penelitiannya tidak memerlukan rumusan hipotesis, atau dalam bahasa lain penelitian kualitatif yang dipentingkan bukanlah kuantifikasi akan tetapi kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji.²⁴

Metode deskriptif ini juga berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan status penelitian pada saat ini.²⁵ Pendekatan deskriptif yang digunakan bersifat eksploratif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan.²⁶

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua , yaitu:

a. Data primer

Merupakan data dasar (*primary data*) yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh dari informan yang berupa pengamatan terkait pemenuhan standar proses pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah dasar, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: kepala sekolah dan guru PAI.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta. 2002), 147.

²⁵ Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Yogyakarta: Anda Offset. 1990), 8.

²⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kulaitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1966), 12.

b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang mendukung data utama. Yaitu, data yang bersumber dari literatur-literatur yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian atau bersumber dari media-media, baik dari media massa atau media lain yang mendukung, seperti jurnal pendidikan dan artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, penelitian kualitatif meletakkan data bukan sebagai alat dasar pembuktian, akan tetapi sebagai modal dasar pemahaman.

Dalam memperoleh informasi, kita memperhatikan tiga macam sumber, yaitu berupa orang (*person*), tempat (*place*), dan simbol (*Paper*).²⁷ Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pemenuhan standar proses pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah dasar, seperti

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 172.

metode atau cara yang diterapkan, kondisi lingkungan, program yang mendukung, dan media.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer terkait dengan pemenuhan standar proses pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah dasar seperti, program yang mendukung, sistem, dan pandangan terkait pelaksanaan kurikulum 2013 tahap awal.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data mengenai materi yang digunakan, lembar-lembar kerja, profil sekolah dan penilaian kinerja guru serta dokumen pendukung.

4. Analisis data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data. Penulis menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁸ Adapun prosedurnya adalah:

a. Reduksi data

²⁸ Miles dan Huberman, *Analisi Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), 14.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis.

c. Penarikan kesimpulan

Format penilaian menggunakan format penilaian observasi check list atau skala prosentase yang kemudian dideskripsikan dengan analisis kualitatif²⁹ untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar proses pendidikan untuk mata pelajaran PAI.

Dengan formula sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{f1} \times 100\%$$

Keterangan:

P = angka prosentase

f = frekuensi

$f1$ = jumlah item

dengan keterangan sebagai berikut:

90 – 100 = sangat baik

80 – 89 = baik

70 – 79 = cukup baik

²⁹Riduan dan Tita Lestari, *Dasar-dasar Statistika* (Bandung: Alfabeta, 2001), 19-21.

< 60 = kurang baik

Berkaitan dengan hal ini setelah memperoleh data lapangan, peneliti mengumpulkan, memilih serta memilahnya, selanjutnya menganalisis dengan mendeskripsikan data yang telah dipilih tersebut dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang pemenuhan standar proses belajar mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar, dan akhirnya peneliti melakukan induksi untuk data-data tersebut.

5. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan atau kesahihan data mutlak diperlukan dalam kesahihan studi kualitatif. Oleh karena itu agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya maka dilakukan verifikasi data tersebut yang dilakukan dengan pengecekan keabsahan data.

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar dalam penelitian kualitatif tidak bias dan menemukan kriteria keilmiah. Beberapa teknik uji keabsahan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kriteria dan teknik pemeriksaan. Disini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang telah diperoleh melalui sumber lainnya dengan mengecek balik dan membandingkan derajat

kepercayaan suatu informasi.³⁰ Triangulasi dalam penelitian ini dapat dicapai melalui hal-hal berikut:

- a. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara.
- b. Membandingkan data keadaan dan perspektif informan dengan pandangan dan pendapat orang lain.

G. Sistematika

Untuk mempermudah dalam mencari isi pembahasan, berikut ini dikemukakan sistematika tesis sebagai berikut:

BAB I merupakan awal pembahasan tesis yang berisi pokok-pokok pemikiran yang melatarbelakangi pemikiran tesis ini. Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II dipaparkan kajian pustaka yang berkaitan dengan pembelajaran. Pertama, teori-teori pembelajaran, Kedua, konsep mengenai standar proses dan ketiga konsep pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pada BAB III akan memuat uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang antara lain meliputi: Deskripsi obyek penelitian yang meliputi, lokasi penelitian, kondisi lingkungan, serta profil sekolah.

³⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, 164.

Pada BAB IV ini berisikan tentang pembahasan tentang hasil penelitian yang mencakup tentang penyajian data terkait pemenuhan standar proses pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah dasar yang meliputi 1). pelaksanaan pendidikan agama Islam; 2). analisis hasil upaya pemenuhan standar proses pembelajaran berdasarkan standar pendidikan. Masing-masing poin memiliki sub bahasan yang telah disesuaikan.

Pada BAB V merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang terkait dengan permasalahan yang ada.